

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan harus dilakukan adil dan merata agar setiap masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Salah satu bukti telah terjadinya pembangunan adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah Indonesia. Pembangunan ekonomi akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat setiap tahun.

Laju pertumbuhan yang terjadi di tiap-tiap sektor ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk menggali potensi daerahnya lebih baik lagi di berbagai sektor ekonomi. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda, sehingga kebijakan pusat belum tentu dapat diterapkan pada setiap daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui otonomi daerah memiliki kewajiban untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Peran pemerintah daerah dalam menganalisis potensi ekonomi wilayahnya sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Hal ini terkait dengan kewajibannya menentukan sektor-sektor ekonomi yang perlu

dikembangkan agar perekonomian daerah dapat tumbuh dengan cepat. Pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Perekonomian dikatakan tumbuh apabila jumlah balas jasa riil terhadap pengguna faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Indikator penting untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat diketahui melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Apabila secara berkala pertumbuhan PDRB positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila pertumbuhannya negatif menunjukkan terjadinya penurunan ekonomi (Susanti, dkk, 1995).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2009-2011) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Persen).

Lapangan Usaha	2009	2010	2011
Pertanian	40,53	38,72	38,28
Pertambangan	2,04	1,86	1,82
Industri Pengolahan	13,46	13,49	13,30
Listrik, Gas dan Air bersih	0,36	0,37	0,38
Bangunan	4,88	4,78	4,84
Perdagangan, Hotel dan restoran	16,09	15,93	15,83
Transportasi dan komunikasi	6,70	7,30	7,77
Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	8,38	9,99	10,10
Jasa-jasa	7,57	7,55	7,68
Jumlah PDRB	100	100	100

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2012.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung tahun 2009-2011 menurun. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola dari berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki kewenangan yang luas dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengaturan keuangan daerah masing-masing. Dengan demikian pertumbuhan daerah diharapkan menjadi lebih optimal dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung di mana sumbangan PDRB terbesar berasal dari sektor pertanian. Pada tahun 2006, Kabupaten Lampung Selatan mengalami pemekaran kembali menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.

Sektor Pertanian merupakan sektor yang sangat penting pada hampir setiap daerah di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Pada Kabupaten Lampung Selatan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah.

Potensi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat melalui suatu kontribusi atau sumbangan dari masing-masing sektor dalam pembangunan PDRB yang dalam konteks lebih jauh akan memperhatikan bagaimana suatu sektor perekonomian mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di berbagai sektor.

Untuk melihat kontribusi dari masing-masing sektor dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. PDRB Kabupaten Lampung Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (persen).

No	Sektor-sektor	2009	2010	2011
1	Pertanian	47,73	48,94	45,62
2	Pertambangan	1,20	1,24	1,17
3	Industri Pengolahan	8,67	9,24	9,18
4	Listrik, Gas, dan Air	0,39	0,44	0,44
5	Bangunan	4,60	4,95	4,94
6	Perdagangan, Hotel	11,70	12,53	11,98
7	Pengangkutan, Komunikasi	10,26	11,48	11,70
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa	6,12	6,39	6,02
9	Jasa-jasa	9,32	9,62	8,94
	Jumlah	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2012

Tabel 2 menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama 2009-2011 didominasi oleh sektor pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan sumbangan PDRB terbesar pada setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan.

Sumbangan sektor pertanian pada pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa hal: (i) menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat, (ii) meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier, (iii) menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus menerus, (iv) meningkatkan pendapatan desa untuk mobilitas yang dilakukan oleh pemerintah, (v) memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan.

Namun demikian perlu diketahui apakah sektor pertanian di Kabupaten Lampung Selatan apakah termasuk sektor pertanian basis atau non basis. Teori basis ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis, kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah dan bersifat *exogenous* yaitu tidak tergantung pada kekuatan intern atau permintaan lokal. Kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat sehingga sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2004).

B. Perumusan Masalah

Pemekaran yang terjadi pada tahun 2006, dengan berpisahnya Kabupaten Pesawaran dari Kabupaten Lampung Selatan, diduga akan menyebabkan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan menurun. Hal ini menyebabkan kontribusi Kabupaten Lampung Selatan terhadap PDRB Provinsi Lampung mengalami penurunan. Beberapa sektor yang menjadi pendapatan berkurang, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan Kabupaten Lampung Selatan perlu upaya untuk meningkatkan pendapatan (PDRB) daerahnya, antarlain dengan meningkatkan kontribusi sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan, sehingga pertumbuhan sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian perlu diketahui bagaimana pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya pertumbuhan sektor pertanian setelah terjadinya pemekaran pada Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu perlu diketahui subsektor apa saja yang dapat membantu dalam upaya peningkatan pendapatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Selatan, dengan sektor pertanian masih memiliki peranan yang penting sebagai penyumbang PDRB terbesar. Selain itu perlu diketahui subsektor pertanian yang menjadi prioritas yang dapat

dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan setelah terjadinya dua kali pemekaran (Tanggamus dan Pesawaran), di mana daerah-daerah yang mekar merupakan sentra produksi pertanian.

Hingga saat ini di Kabupaten Lampung Selatan belum teridentifikasi sektor-sektor potensial terutama subsektor pertanian unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten Lampung Selatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu belum diketahui bagaimana pertumbuhan subsektor pertanian tersebut terutama subsektor pertanian unggulan yang merupakan sektor yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah. Berdasarkan permasalahan di atas dapat diidentifikasi beberapa model penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Selatan?
2. Subsektor pertanian apa yang dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan?
3. Bagaimana dampak pengganda dari sektor pertanian terutama subsektor yang menjadi prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Mengetahui pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengidentifikasi subsektor pertanian apa yang menjadi unggulan di Kabupaten Lampung Selatan.

3. Mengetahui dampak pengganda dari sektor pertanian terutama subsektor pertanian unggulan di Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang potensi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan potensi daerahnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait dalam perencanaan pengelolaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan.
3. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut.